

RINGKASAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

PT WUKIRASARI

Kaimana, Papua Barat

1. HASIL PENILAIAN

PT Wukirasari adalah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi perusahaan kami berkomitmen untuk senantiasa menjamin kelestarian fungsi ekonomi, ekologi dan sosial berdasarkan prinsip pemanfaatan hutan alam lestari. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut PT Wukirasari telah melakukan identifikasi dan analisa yang mendukung perencanaan dan perumusan pengelolaan hutan alam dalam wilayah konsesi. Adapun hasil identifikasi dan analisa yang telah dilakukan PT Wukirasari antara lain:

- **Dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)**, dalam dokumen tersebut merupakan hasil dari survey pengumpulan data potensi awal kondisi sediaan tegakan hutan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh tahun) di dalam hutan produksi (hutan alam).
- **Laporan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)**, merupakan dokumen yang berisi data survey terkait pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap rencana pohon tebang, pohon inti, pencatatan koordinat pohon serta penandaan tentang kondisi medan/lapangan seperti alur/sungai dan keberadaan NKT.
- **Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**, merupakan dokumen induk sebagai persyaratan dan komitmen PBPH untuk kegiatan pengolahan hasil hutan skala usaha menengah/besar yang berdampak merusak bentang alam dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Hasil akhir dari kegiatan studi AMDAL adalah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dengan dokumen AMDAL.
- **Dokumen RKL/RPL**. Dokumen RKL menjadi dasar rumusan arah pengelolaan bagaimana PBPH akan melakukan pengelolaan karena memuat upaya pencegahan, pengendalian, dan pengendalian dampak penting negatif dan upaya peningkatan dampak penting positif yang timbul sebagai akibat rencana kegiatan perusahaan hutan. Sedangkan dokumen RPL merupakan perangkat kontrol terhadap hasil dan implementasi studi AMDAL, kegiatan pengelolaan lingkungan akan dipantau berdasarkan arahan, prinsip dan prosedur yang tertuang di dalam dokumen ini. Hasil dari kegiatan pemantauan akan menjadi bahan evaluasi serta menjadi dasar menentukan langkah-langkah operasional pengelolaan lingkungan selanjutnya.
- **Dokumen Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT)** merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan hutan lestari. Hasil identifikasi NKT menjadi rancangan yang membantu PBPH dalam mengelola hutan dalam usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hasil akhir dari kegiatan identifikasi NKT adalah rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemantauan NKT yang teridentifikasi.

a. Sumber Daya Alam dan Nilai-Nilai Lingkungan

Sumber daya alam yang terdapat di dalam konsesi PT Wukirasari yang telah teridentifikasi meliputi kawasan lindung, tipe ekosistem, tipologi tanah, flora dan fauna.

- **Kawasan Lindung**, kawasan yang dicadangkan sebagai kawasan lindung di PT Wukirasari antara lain :
 - Sempadan sungai seluas 630 Ha

- Buffer Zone Hutan Lindung seluas 4.941 Ha
 - Hutan Lindung seluas 2.826 Ha
 - Cagar Alam seluas 197 Ha
 - Mangrove seluas 223 Ha
 - Karst seluas 1.370 Ha
 - Kelas ketererangan > 40% seluas 210 Ha
 - KPPN seluas 1.045 Ha
- **Tipe Ekosistem** di PT Wukirasari yang teridentifikasi berdasarkan kajian NKT yaitu hutan dataran rendah, hutan karst, hutan kerangas, hutan perbukitan dataran rendah, hutan pegunungan, mangrove dan rawa gambut.
 - **Tipologi atau Jenis Tanah** yang terdapat di PT Wukirasari ada 5 (lima) yaitu Dystrudepts/ Hapludults, Endoaquents/ Haplohemists, Eutrudepts/ Udorthents, Hapludolls/ Eutrudepts, Udorthents/ Hapludolls.
 - **Keanekaragaman Jenis Flora dan Fauna** yang terdapat di PT Wukirasari berdasarkan kajian NKT terdiri atas 4 (empat) taksa. Temuan dari jenis flora/fauna dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Taksa	Total Jenis RTE	JENIS PENTING						
		IUCN			CITES		P. 106	Endemik
		CR	EN	VU	App I	App II	D	
Vegetasi	49	2	0	1	0	1	2	2
Mamalia	3	1	0	3	0	2	3	0
Burung	29	0	0	2	1	19	27	5
Herpetfauna	3	0	0	0	0	3	3	0

b. Sumberdaya dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Persyaratan dan standar pengelolaan hutan produksi yang terus berkembang mendorong PT Wukirasari untuk terus berbenah. Tidak hanya fokus pada fungsi produksi namun juga berusaha untuk memenuhi setiap aspek yang berkaitan dengan pengelolaan yang berkelanjutan, dalam hal ini juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar konsesi yang terdampak kegiatan operasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data PT Wukirasari melakukan sebuah kajian terkait Penilaian Dampak Sosial (*Social Impact Assessment*) berbasis Rapid Rural Appraisal (RRA). Hasil kajian tersebut menghasilkan gambaran lebih dalam untuk merumuskan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang ditimbulkan serta memberikan masukan kepada perusahaan agar pengembangan masyarakat sebagai bagian dari CSR yang akan dikembangkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai bagian dari mitigasi dampak sosial. Berikut adalah daftar kampung yang terdapat di dalam dan disekitar PT Wukirasari:

KAMPUNG	DISTRIK	KABUPATEN	LOKASI TERHADAP KONSESI	
			Dalam Areal	Sebagian di Dalam Areal
ERGARA	TELUK ARGUNI	KAIMANA		✓
KENSI	TELUK ARGUNI			✓
MASKUR	TELUK ARGUNI			✓
PIGO	TELUK ARGUNI		✓	
SARBEI	KURI	TELUK BINTUNI		✓
NARAMASA	KURI			✓
WAGURA	KURI		✓	
TANER/REFIDESO	KURI		✓	
AWEGRO	KURI			✓
OTEMTRA	KURI			✓

Berdasarkan lokasi kampung yang terdapat di dalam areal PT Wukirasari terdapat 3 (tiga) kampung, sedangkan 7 (tujuh) sisanya adalah sebagian terletak di dalam PT Wukirasari. Lokasi kampung ini juga diduga akan mempengaruhi interaksi yang timbul antara masyarakat dengan keberadaan PBPH yang mana dari 10 kampung 2 (dua) diantaranya menunjukkan bentuk interaksi yang kurang intensif (√), sedangkan 8 (delapan) sisanya intensif(√). Bentuk interaksi masyarakat dengan PT Wukirasari antara lain : Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (Memangkur sagu, mencari getah pohon/kayu, berburu dan mencari obat), Pemanfaatan sumber daya air (Mencari ikan, MCK, air minum) dan pemanfaatan sumber daya lahan (berkebun/berladang).

Mata pencaharian masyarakat juga erat berkaitan dengan sumber daya alam khususnya hutan di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Mayoritas mata pencaharian yang memiliki kemiripan antar kampung yaitu kebiasaan mencari kayu/kulit kayu untuk dijual ke pengepul atau diproses sendiri untuk di ekstrak minyak atsirinya. Adapun aktivitas lainnya yaitu berburu, mencari ikan, berkebun/berladang (pisang, singkong betatas, jagung, keladi, pinang, rambutan, durian dll) untuk konsumsi sendiri ketika berlebih baru dijual, dibarter dengan tetangga atau sekedar dibagikan kepada tetangga. Hasil pemungutan HHBK akan dikumpulkan untuk dijual ke luar kampung seperti kulit kayu masohi, lawang, damar dan gaharu. Selain itu terdapat profesi masyarakat yang cukup menarik yaitu berburu buaya untuk dijual kulitnya, perburuan buaya akan dilakukan ketika ada pesanan saja.

Sarana dan prasarana ekonomi masyarakat di sekitar kampung masih sangat sulit, oleh karenanya masyarakat lebih sering mengkonsumsi hasil pertaniannya sendiri. Dari kondisi yang demikian PT Wukirasari mencoba untuk memfasilitasi jual beli masyarakat dengan cara memfasilitasi pasar dan membeli sebagian besar hasil bumi masyarakat sisanya seperti buah-buahan dibeli oleh karyawan/ti. Dari hal ini diharapkan untuk kedepannya akan semakin meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

c. Risiko Sosial dan Lingkungan Utama di Kawasan

Analisis risiko berdasarkan hasil kajian ditemukan beberapa isu yang mempunyai tingkat risiko dari yang rendah sampai tinggi/penting. Dalam rangka usaha memetakan risiko tersebut PT Wukirasari telah membuat beberapa kajian antara lain :

- Kajian AMDAL
- Laporan Identifikasi NKT
- Kajian SIA-RRA
- Peta sebaran ulayat
- Laporan Monitoring SIA
- Laporan pemetaan konflik
- Laporan register isu sosial
- Laporan tingkat bahaya erosi
- Laporan kualitas air sungai

Analisa berdasarkan isu dan dampak sosial yang perlu mendapatkan perhatian adalah: perladangan, SDM rendah, minimnya pendidikan luar sekolah, sungai keruh, kesehatan anak dan buruknya sarana penerangan kampung. Oleh karenanya PT Wukirasari akan senantiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah isu sosial tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di dalam dan disekitar areal konsesi.

Setiap kegiatan yang berisi tentang rencana pengelolaan sosial dan lingkungan terangkum dalam Rencana Operasional (RO) perusahaan, sedangkan laporan resolusi konflik menurut p.5 yang mana sekarang mengikuti peraturan terbaru yaitu Permen LHK no.8 tahun 2021 yang dilaporkan setiap semester kepada Dinas Kehutanan, BPHP dan Dirjen PHL.

d. Jasa Ekosistem

PT Wukirasari **tidak** melakukan klaim atas jasa ekosistem.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Hak-Hak Pekerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesetaraan Gender

Hak-hak pekerja meliputi sistem pengupahan, tunjangan & hari libur, jaminan sosial, sarana prasarana, pelatihan karyawan diatur dan dijelaskan di dalam peraturan perusahaan. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 tahun sekali dan disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Program kerja dan kegiatan K3 direncanakan dalam Tusapro (Tujuan Sasaran Program) yang disusun secara tahunan. Program kerja serta kegiatan K3 di implementasikan dalam suatu Sistem Manajemen K3 dan dibentuk Panitia P2K3 sebagai perangkat SDM (Sumber Daya Manusia) penerapan sistem Manajemen K3. Kegiatan P2K3 yang dilakukan meliputi *safety induksi* untuk karyawan baru, *safety talk*, *safety patrol* untuk seluruh karyawan di lingkungan PT Wukirasari, pemasangan spanduk K3, pemasangan rambu-rambu dan pembatas jalan serta monitoring kotak P3K dan APAR. Seluruh kegiatan K3 dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap seluruh karyawan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat tercapai tanpa adanya fatality akibat kecelakaan. Laporan P2K3 dilaporkan kepada Dinas DPMPTSP dan Tenaga Kerja dan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Implementasi kesetaraan gender diterapkan dalam proses perekrutan, pengupahan, pelatihan dan terutama partisipasi perempuan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan manajemen dan LKS Bipartit. Program dan kegiatan sosialisasi kesetaraan gender sekaligus sosialisasi mekanisme penerapannya dilakukan secara tahunan. Sebagai bentuk komitmen, Management PT Wukirasari juga menuangkan dalam kebijakan tertulis terkait Anti Diskriminatif dan Anti Pelecehan Seksual yang mana menjamin seluruh karyawan untuk bekerja tanpa adanya diskriminasi dan pelecehan sehingga kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat dirasakan oleh semua pihak.

b. Masyarakat Adat, Hubungan Masyarakat, Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Setempat

Kehadiran dan beroperasinya PT Wukirasari turut memberikan interaksi positif maupun interaksi yang negatif. Dampak yang timbul dari hubungan PT Wukirasari dan masyarakat termasuk perubahan serta motivasi masyarakat yang seiring waktu berubah atas cara pandang terhadap perusahaan. Disisi lain rencana kelola sosial juga turut berubah secara dinamis mengikuti cara hidup masyarakat, budaya, sistem politik, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, hak-hak pribadi dan hak milik serta aspirasi masyarakat. Mengikuti perubahan tersebut PT Wukirasari telah merencanakan pengelolaan sosial yang terangkum dalam Rencana Operasional (RO). Jenis kegiatan yang direncanakan meliputi :

- Aspek penghargaan hak adat dan penyelesaian konflik
- Aspek penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat
- Aspek bantuan prasarana umum
- Aspek pelayanan pendidikan dan sosial budaya
- Aspek operasional dan pengembangan

c. Keterlibatan Pemangku kepentingan dan Penyelesaian Perselisihan dan Keluhan

Program Kelola Sosial menjadi salah satu aspek yang penting dalam operasional PT Wukirasari karena dalam perjalanannya seluruh kegiatan operasional melibatkan masyarakat dan budayanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Melalui pelibatan masyarakat adat yang sesuai dengan budayanya diharapkan akan meminimalisir adanya konflik antara kedua belah pihak sehingga manfaat hutan dapat di rasakan oleh kedua belah pihak (PBPH-Masyarakat). Mengingat hutan yang menjadi areal konsesi PT Wukirasari adalah hutan yang dibebani hak/hutan hak maka PT Wukirasari telah merencanakan dan merealisasikan kajian *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) untuk memastikan informasi dari masyarakat khususnya para pemangku kepentingan untuk menyetujui atau tidak menyetujui penguasaan lahan/tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka oleh adanya PT Wukirasari. Secara lebih rinci keterlibatan pemangku kepentingan dan penyelesaian konflik telah direncanakan dan direalisasikan pada kegiatan dibawah ini:

- SINARA Tahunan
- Pemetaan Konflik
- Tata Batas Kolaboratif
- Kompensasi Hak Ulayat
- Penyelesaian Perselisihan
- Penyelesaian Denda

Keluhan serta penyelesaian keluhan tidak terbatas pada masyarakat adat namun juga kepada karyawan/ti. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dan keluhan karyawan diakomodir dalam Prosedur Keluhan, Kritik, Saran, Pengaduan dan Perselisihan Karyawan, serta Lembaga Kerjasama BIPARTIT.

d. Kegiatan dan Jadwal Pengelolaan yang Direncanakan, Sistem Silvikultur yang Digunakan, Metode dan Peralatan Pemanenan

• Sistem Silvikultur yang Diadopsi PT Wukirasari

Berdasarkan kondisi topografi yang ada PT Wukirasari mengadopsi Sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) yang lebih mampu mengakomodir kondisi hutan alam dengan kondisi medan dengan topografi sedang hingga berat. Unit manajemen juga menerapkan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) yang diterapkan untuk penanaman pengayaan dengan pola rumpang, disisi lain juga menerapkan pola jalur sebagai uji coba.

• Kegiatan dan Jadwal Pengelolaan yang Direncanakan

Implementasi kegiatan dan jadwal pengelolaan secara umum dengan mengacu pada tahapan-tahapan TPTI serta RKTPH dan RKUPH sebagai berikut :

- Penataan Areal Kerja (PAK)
- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
- Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
- Pemanenan
- Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan
- Perlindungan dan Pengamanan Hutan (setiap bulan selama PBPH beroperasi)

• Metode dan peralatan pemanenan

PT Wukirasari menerapkan metode pemanenan ramah lingkungan atau *Reduced Impact Logging* (RIL). Teknik pemanenan RIL yang dipilih adalah ground based skidding dengan menggunakan Bulldozer. Alat pemanenan lainnya dan supportingnya diantaranya chainsaw, excavator, dump truck, motor grader, wheel loader, truck tanki, logging truck.

e. **Dasar Tingkat Pemanenan Kayu**

PT Wukirasari telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) sepuluh tahun (2018-2027). PT Wukirasari juga telah melaksanakan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebagai dasar penyusunan RKUPHHK-HA, IHMB dilaksanakan pada tahun 2018. Penentuan luas, lokasi dan urutan blok tebangan tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan data sediaan tegakan (standing stock) hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dalam penentuannya berpegang pada prinsip dasar areal dengan sediaan tegakan yang lebih tinggi sedapat mungkin direncanakan dilakukan penebangan terlebih dahulu, dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan teknis dan ekonomis dalam pelaksanaan operasionalnya.

Penentuan jatah tebang tahunan PT Wukirasari masih berbasih pada IHMB dan belum berdasarkan riap yang dibuat dan diukur oleh manajemen PT Wukirasari mengingat data hasil pengukuran belum selesai dilakukan. Etat volume dihitung berdasarkan pada pembagian potensi sediaan tegakan dan daur. Adapun perhitungan etat volume disetiap fungsi kawasan hutan PT. Wukirasari adalah sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa Etat Volume di PT. Wukirasari adalah :
= 302.038 m³ / tahun.

Jatah Produksi Tahunan (JPT) sebesar :
= 211.427 m³/tahun

3. LANGKAH-LANGKAH PELESTARIAN

a. **Habitat, Spesies Langka dan Terancam**

Upaya PT Wukirasari dalam rangka menjaga habitat, spesies langka dan terancam dilakukan dengan cara melakukan identifikasi secara mandiri berdasarkan dokumen AMDAL maupun RKUPH. Selain itu PT Wukirasari juga melakukan kajian NKT untuk mengetahui mana saja areal yang termasuk habitat spesies langka dan terancam. Dari hasil identifikasi tersebut rekomendasi yang ada akan menjadi dasar bagi PBPH untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan. Dari hasil rumusan tersebut kemudian akan dituangkan pada strategi dan rencana aksi pengelolaan NKT yang telah dikonsultasikan kepada para pakar untuk dilaksanakan implementasinya oleh bagian dari organisasi yang berkaitan.

b. **Badan Air dan Sempadan Sungai**

Sungai dan sempadan sungai sangat penting dalam upaya pelestarian baik habitat satwa darat maupun akuatik, disisi lain juga sebagai NKT 4.1 kawasan penting yang menyediakan air dan pengendalian banjir untuk kebutuhan masyarakat di hilir. Pengelolaan badan air dan sempadan sungai di PT Wukirasari mengikuti ketentuan dari *Code of Practice in Asia Pacific RAP Publications Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations Regional of for Asia and the Pacific. 1999, Bangkok, Thailand, P.8* Menlhk tahun 2021. Normalisasi aliran sungai pasca pembuatan jalan atau jembatan dan penanaman sempadan pasca pembuatan jembatan dilakukan untuk mengurangi efek negatif erosi dan sedimentasi pada badan air.

c. **Keterhubungan Lanskap Termasuk Koridor Satwa**

PT Wukirasari berkomitmen untuk tidak melakukan konversi lahan dan meminimalisir keterbukaan pada kegiatan operasionalnya sehingga keterhubungan lanskap dapat terjaga, termasuk perencanaan yang matang dan penerapan penebangan ramah lingkungan menjadi hal

penting dalam meminimalisir keterbukaan wilayah dan melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi. Koridor satwa yang utama adalah keberadaan sungai dan sempadan sungai.

d. Keterwakilan Kawasan

Keterwakilan kawasan pada PBBH adalah dengan keberadaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, Karst, Mangrove dan kawasan lindung lainnya. KPPN adalah suatu tipe kawasan pelestarian di dalam habitat aslinya (in situ) di kawasan hutan produksi untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah baik dari jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik (Kepmenhutbun No. 375/Kpts-II/1998). Kegiatan pengelolannya adalah dengan melakukan tata batas dan pemasangan plang, sehingga dalam operasional produksi diharapkan tidak terdapat ancaman atau gangguan terhadap kawasan tersebut. Pemantauan dilakukan secara periodik untuk mengetahui kondisi dinamika keberadaan flora fauna di dalam area tersebut sesuai tata waktu berjalan.

e. Jasa Lingkungan

PT Wukirasari tidak mengklaim jasa lingkungan.

f. Nilai Konservasi Tinggi

PT Wukirasari telah melakukan kajian identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dengan menggandeng pihak ke 3 (tiga). Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa PT Wukirasari memiliki seluruh atribut NKT. Setiap atribut NKT memiliki potensi ancaman masing-masing, sehingga bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berbeda pula disesuaikan dengan resiko ancaman yang akan timbul sekarang atau di kemudian hari. Bentuk pengelolaan dan pemantauan telah dirangkum dalam dokumen strategi dan rencana aksi pengelolaan dan pemantauan NKT.

4. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENILAI, MENCEGAH, DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF DARI KEGIATAN PENGELOLAAN

a. Nilai-Nilai Lingkungan

Dampak negatif kegiatan pengelolaan terhadap nilai lingkungan diidentifikasi dan didokumentasikan dalam Dokumen AMDAL, RKL/RPL. Implementasi upaya mitigasi di lapangan diatur sesuai tingkat dampak negatif yang ditimbulkan, tata waktu dan didokumentasikan dalam RO Lingkungan dan Site Impact Assessment. Pasca kegiatan produksi, operator memperlakukan mitigasi pada petak-petak terbang untuk mengurangi dampak negatif, melakukan monev RIL dan kegiatan rehabilitasi lahan pasca pemanenan untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap dampak lingkungan dapat dicegah dan diminimalisir. Kegiatan untuk mengurangi dampak lingkungan antara lain Patroli perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi lokasi yang terdegradasi seperti bekas TPN, Jalan Sarad, Ka-Ki Jalan, Ka-Ki Jembatan.

b. Nilai Sosial

Dampak negatif dari kegiatan pengelolaan terhadap nilai sosial diidentifikasi dalam dokumen AMDAL, RKL/RPL, SIA dan FPIC. Upaya mitigasi dilakukan sesuai dengan Mekanisme dan SOP secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan yang kompeten dan didokumentasikan dalam laporan dan RO Kelola Sosial.

5. RENCANA DAN KEGIATAN PROGRAM PEMANTAUAN

a. Pertumbuhan dan Hasil

Pertumbuhan dan hasil di analisa berdasarkan kegiatan pengukuran dan perencanaan hasil produksi. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat petak pengamatan yaitu Plot Sampel Permanen (PSP) dan Petak Ukur Permanen (PUP). PSP dilakukan untuk

mengetahui kondisi tegakan sebelum dan setelah penebangan, bagaimana pertumbuhan dan regenerasi hutan alam terjadi. Sedangkan PUP digunakan untuk pemantauan riap di bekas tebangan, data akhir dari pemantauan riap di PUP ini adalah diketahuinya Current Annual Increment (CAI, m³/ha/tahun) dan Mean Annual Increment (MAI, m³/ha/tahun) sebagai dasar penentuan jatah tebang.

b. Nilai-Nilai Lingkungan

• Air

Program pemantauan air meliputi pemantauan kualitas air untuk dikonsumsi serta kualitas air di beberapa lokasi sungai dan air laut yang terkena dampak operasional perusahaan. Pemantauan kualitas air dilakukan oleh unit manajemen secara periodik dan juga dilakukan Bersama pihak ketiga penguji lab kualitas air yang sudah terakreditasi. Parameter yang diuji meliputi, parameter fisika (pH, BOD, COD, TSS, dll), kimia.

• Tanah

Pemantauan terhadap tanah dilakukan dengan monitoring dan evaluasi terhadap lokasi bekas penebangan serta pemantauan erosi. Pemantauan erosi di PT Wukirasari dilakukan dengan metode stik yang ditempatkan pada kelas lereng 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan >40%. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

• Flora dan Fauna

Perencanaan untuk mengetahui kondisi flora dan fauna adalah dengan pengelolaan habitat serta pemantauan secara periodik. Pemantauan terhadap flora dan fauna dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Pemantauan	Metode	Analisa Data
Flora	Analisa Vegetasi	Kerapatan Jenis Frekuensi Dominansi Indeks Nilai Penting (INP) Indeks Diversitas Shannon – Wiener (H')
Aves (Burung)	Point Count Kamera trap	N/Ha Indeks Diversitas Shannon – Wiener (H') Indeks Eveness (E)
Mamalia & Reptil	Transek Garis Kamera trap	N/Ha Indeks Diversitas Shannon – Wiener (H') Indeks Eveness (E)

• Kawasan Lindung

Upaya pemantauan kawasan lindung tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasannya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kawasan lindung, dinamika perubahan yang ada di dalamnya dan mencakup kondisi flora-fauna.

c. Dampak Operasional

• Sosial

Kajian Sosial dan Monitoring Evaluasi dalam Pengembangan Kegiatan PT Wukirasari bersama masyarakat, meliputi :

- Kajian Rapid Rural Appraisal (RRA) pada masyarakat/kampung terdampak operasional

- SIA untuk mengetahui aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan.
- Kajian FPIC pada masyarakat pemilik ulayat/kampung
- Pengembangan sistem perlindungan dan pengamanan hutan
- Evaluasi program-program sosial per semester pada RKT berjalan
- Penyuluhan/sosialisasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan program.

• **Lingkungan**

Pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi :

- MONEV RIL
- Pemantauan penanaman, pemeliharaan dan monitoring gangguan pada tanaman yang meliputi spesies invasive dan hama penyakit
- Pemantauan curah hujan
- Pemantauan debit dan kualitas air sungai
- Pemantauan Erosi
- Pemantauan suhu dan kelembaban suhu harian
- Pemantauan Hotspot
- Monitoring dan Pengelolaan Limbah

d. Nilai Konservasi Tinggi

Program pemantauan yang diformulasikan dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan NKT memuat:

- Identifikasi ancaman keberadaan NKT
- Sasaran pengelolaan dan pemantauan
- Metode pengelolaan dan pemantauan
- Periode dan frekuensi kegiatan
- Indikator kegiatan
- Strategi intervensi untuk integrasi dalam rencana operasional unit management
- PIC (Person In Charge) atau personel yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
- pengelolaan dan pemantauan pada unit manajemen

e. Sistem Pemantauan yang Ada atau Direncanakan Berdasarkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan dimulai saat proses identifikasi dan perencanaan kegiatan program-program pemantauan baik pemantauan aspek lingkungan maupun aspek sosial. Konsultasi dalam program pemantauan melibatkan pakar , instansi litbang, lembaga penelitian, universitas, maupun tokoh masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta mendapatkan informasi terkini atau hasil penelitian terbaru sehingga pengolahan adaptif dapat terlaksana.

